

**PENGARUH KOORDINASI KEPALA DESA TERHADAP TINGKAT
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI DESA LALONG
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN**

Oleh:

Kisman Karinda

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk
Email : kisman@unismuhluwuk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Koordinasi Kepala Desa terhadap Tingkat keberhasilan Pembangunan di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Kuesioner atau angket, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Lalong kecamatan Tinangkung Utara yang berjumlah 921 jiwa, mengingat besarnya jumlah populasi maka penulis menggunakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan Rumus Slovin yang sehingga jumlah sampel sebanyak 35 responden, teknik pembobotan yang digunakan adalah skala likert sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yakni bentuk penelitian yang menggambarkan, memaparkan obyek penelitian yang diteliti dan menjabarkan dalam bentuk distribusi frekwensi.sekaligus menggunakan metode regresi sederhana, dan didalam definisi oprasional penulis menentukan bahwa Koordinasi Kepala DesaSebagai variable (X) dan sebagai variable (Y) adalah tingkat keberhasilan Pembangunan. hasil penelitian Pengaruh secara partial dimana variable Koordinasi Kepala Desa (X) nilai t hitung $4.049 > t \text{ table } 1.697$ dengan tingkat nilai probabilitas sebesar 0.000 hal ini dapat dikatakan bahwa variable koordinasi Kepala Desa (X) berpengaruh terhadap variable Tingkat Keberhasilan Pembangunan. (Y).

Kata Kunci : Koordinasi , Kepala Desa, keberhasilan, pembangunan

Abstract

This study aims to determine how the Effect Coordination Village head toward success rate of development in the village of Lalong District of Tinangkung North Banggai Kepulauan The technique used in this study is the observation, questionnaire or questionnaires, the population in this study were all villagers of Lalong subdistrict Tinangkung North which amounted to 921 people, given the large number of population, the authors use a sampling technique by using a formula Slovin are thus the total sample of 35 respondents, engineering weighting used is a Likert scale, while data analysis techniques used in this research is quantitative descriptive analysis that is a form of research which depicts, describes the research object studied and elaborated in the form of distribution frekwensi.sekaligus simple regression method, and in the operational definition of the authors determined that the Coordination Head D esaSebagai variable (X) and a variable (Y) is a development success rate. Effect of partial results of the study in which the village chief Coordination variable (X) t value $4,049 > t$ table $1,697$ with a probability value of 0.000 level it can be said that the coordination variable Village Head (X) affects variable Success Rate of Development. (Y).

Keywords: Coordination, village head, success, development

1. PENDAHULUAN

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Penjabaran dari Undang-Undang tersebut bahwa dengan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa, maka desa dapat diberikan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut. Desa merupakan bagian dari sub system pemerintahan di Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan nasional.

Perhatian terhadap penyelenggara pemerintah dan pembangunan di pedesaan akan tetapi menjadi wahana dalam kerangka pembangunan nasional, hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat Indonesia berdomisili di pedesaan, dan juga sebagian besar masyarakat Indonesia yang tertinggal dengan tingkat kesejahteraan yang rendah terdapat di pedesaan. Penerapan otonomi daerah sekarang ini setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomo 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka diharapkan pemerintah desa dapat mensikapi terhadap otonomisasi

yang ada di Desa. Karena keberhasilan suatu daerah dengan melihat indikatornya dimana bahwa desa telah menerapkan otonomisasi. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana sikap masyarakat untuk memotivasi dirinya agar selangkah kedepan pola pikirnya tetap maju. Untuk itu peranan pemerintah desa sangat penting dalam mengatur pemerintahan agar dapat berbuat atau memotivasi warganya untuk merubah pola pikirannya lebih maju, sehingga tidak hanya dapat menerima begitu saja terhadap persoalan pemerintahan yang ada di desa.

Pada hakekatnya sebuah desa diberikan kemampuan untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sepanjang berhubungan dengan kepentingan masyarakat serta disesuaikan dengan aturan-aturan adat yang ada pada desa tersebut. Kepentingan masyarakat yang dimaksud adalah suatu upaya dari pemerintah desa untuk bagaimana hak-hak dari masyarakat itu dapat diakomodir dengan baik, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa tersebut. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh pemerintah Desa karena menyangkut nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang telah ada dari generasi sebelumnya.

Terkait konteks otonomi daerah secara esensinya dapat dikatakan bahwa tidak ada alasan untuk menghambat ketertiban masyarakat dalam mengambil peranan pada setiap kegiatan pembangunan. Kalau dilihat sekilas kelihatan bahwa keterbatasan masyarakat dalam setiap proses pembangunan akan berdampak terhadap waktu yang tersita begitu banyak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah banyak inisiatif dan upaya dalam menyikapi kondisi yang ada untuk mencapai perubahan yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan. Selain pihak pemerintah, unsur swasta dan institusi masyarakat yang lain juga telah melakukan terobosan dan inovasi untuk mendorong terjadinya proses dinamisasi khususnya dalam konteks ekonomi. Berbagai upaya dan

inisiatif para pihak tersebut diwujudkan melalui formulasi produk kebijakan, pengembangan metodologi, pembentukan kelembagaan dan pengembangan program-program implementatif di masyarakat. Kesemuanya tentu untuk mengawasi perubahan yang konstruktif.

Pada kenyataan bahwa pencapaian harapan tersebut sampai saat ini cukup bervariasi dan sebahagian belum membuahkan hasil sebagaimana mestinya. Hal demikian, dapat terjadi karena saat ini masih banyak ditemui masalah dan tantangan yang potensial mendorong munculnya krisis multidimensional. Fakta lain menyatakan bahwa saat ini telah banyak dihadirkan produk kebijakan pusat maupun daerah, diciptakan beragam instrument metodologi untuk paduan implementasi konsep dan program, di bentuk bermacam institusi sebagai wadah yang menjembatani proses komunikasi dan penyaluran aspirasi serta diciptakan model untuk menuangkan berbagai inovasi.

Pelaksanaan tugas pemerintahan, desentralisasi pada satu pihak telah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki terutama pada penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pemerintahan. Indikator ini dapat dilihat dari struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistic dan perangkat kelembagaanyang belum berjalan secara efektif dan efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Demikian pula penyediaan sarana dan prasarana pemerintah yang mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat yang masih sangat minim. Selain itu bidang ketatalaksanaan, tantangan yang dihadapi adalah kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan serta tuntutan masyarakat. Perlu penyempurnaan system ketatalaksanaan dalam pelayanan administrasi pemerintahan Desa terhadap tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan Desa itu sendiri dan

seharusnya sudah merupakan suatu hal yang harus dijadikan skala prioritas.

Disamping itu, indikator lain adalah Koordinasi Kepala Desa perangkat pemerintah Desa dalam upaya pelayanan administrasi desa menghadapi tantangan untuk dapat mengembangkan system perencanaan Sumberdaya Manusia perangkat pemerintah Desa sesuai penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah yang ada saat ini dalam pelayanan administrasi pemerintahan Desa guna mewujudkan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat. Era keterbukaan seperti sekarang masyarakat juga sudah menemukan kembali hak-haknya yang dulu ketika orde baru berkuasa masyarakat seolah olah tidak berdaya apa-apa sehingga dalam proses pembangunan masyarakat di tuntut berperan aktif. Apalagi dalam konteks demokrasi yang mengatakan bahwa kekuasaan sesungguhnya ada di tangan rakyat, maka persepsi masyarakat menjadi penting untuk di bahas dalam rangka melihat secara objektif penyelenggaraan pemerintahan, karena disadari atau tidak bahwa masyarakatlah yang tahu persis kenyataan yang ada di Desa

Salah satu faktor terjadi kesenjangan antara desa dan kota karena pembangunan ekonomi sebelumnya cenderung bias kota (*urban bias*). Akibat pembangunan yang bias perkotaan itu maka sektor pertanian, yang identik dengan ekonomi perdesaan, terus merosotnya sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB). Dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri dan jasa, yang identik dengan ekonomi perkotaan, sektor pertanian terus mengalami ketertinggalan (A. Effendy Choirie, 2009).

Kecenderungan stigma yang melekat pada masyarakat pedesaan selalu diidentikan dengan perilaku dan sikap yang dianggap kolot dan tradisional, yang dilawankan dengan sikap dan perilaku orang kota yang maju dan modern. Terjadinya keterbelakangan sosial masyarakat desa dalam pembangunan dinisbatkan karena

sulitnya masyarakat desa menerima budaya modernisasi, sulit untuk menerima teknologi baru, malas, dan tidak mempunyai motivasi yang kuat, merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan subsisten (kebutuhan pokok yang paling dasar), dan budaya *shared poverty* (berbagi kemiskinan bersama) (Bambang Prakoso, 2008) Cara pandang seperti itu, saya kira saatnya harus dirubah secara total. Karena perilaku dan sikap yang dinisbatkan ke masyarakat pedesaan yang cenderung negative itu tidak seluruhnya benar secara empiris.

Berkaitan dengan kondisi Desa lalong penulis melihat ada hal yang kurang lebih sama dengan yang telah disampaikan diatas, artinya dengan segala permasalahan yang muncul butuh figure yang dapat mengantisipasi munculnya berbagai kendala kendala pembangunan yang ada di desa khususnya desa lalong .Maka ditengah kerisis figure yang ada di desa lalong maka penulis melihat perlu adanya pemetaan terhadap permasalahan yang ada, maka kepala desa sebagai orang nomor satu di desa tentunya bertanggung jawab terhadap persoalan persoalan yang ada di Desa. maka dari itu dituntut koordinasi yang baik anatara kepala Desa Lalong dan semua pihak terkait dalam rangka peningkatan pembangunan Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis termotivasi untuk mengangkat judul penelitian “ Pengaruh Koordinasi Kepala Desa dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di desa lalong kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai kepulauan Kepulauan”

2. METODE PENELITIAN

Terkait penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini terdiri, Observasi (*observation*), Kuesioner (*questioner*) dan Telaah

Dokumen. Adapun Data yang diperlukan untuk dianalisis yaitu data primer dan data sekunder. Mengingat besarnya jumlah populasi desa Lalong 921 jiwa. maka pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dalam Umar (2000 : 78) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

N = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir

Jika jumlah subyeknya dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih." Dalam hal ini penulis mengambil ketidaktelitian 15%. (e = 15% = 0,15) dengan jumlah populasi 921 orang (N=921) jadi jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{921}{1+921(0,15)^2} \\ &= \frac{921}{1+921(0,225)} \\ &= \frac{921}{1+208,5} \\ &= \frac{921}{209,5} = 29.78 \end{aligned}$$

$$n = 35$$

Sehingga jumlah sampel yang ditetapkan menjadi responden adalah sebanyak 35 orang. Adapun variabel yang digunakan yaitu dengan menggunakan skala Likert dengan kategori penilaian yaitu :Sangat setuju/selalu/sangat positif dengan skor 5, Setuju/sering/positif skor 4, Ragu/sedang/netral skor3, Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif skor 2Sangat tidak setuju/tidak

pernah/sangat negatif skor 1. metode analisis menggunakan model Regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Dimana :

Y	=	Tingkat Keberhasilan Pembangunan
a	=	Konstanta Regresi sederhana
b	=	Koefisien regresi
x	=	Koordinasi Kepala Desa

Secara operasional yang dimaksud dengan variabel independen (X) atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi dan menjadi penyebab dari variabel dependent (Y), sehingga dalam penelitian ini adalah Koordinasi Kepala Desa sebagai variabel (X). Variabel(Y). Keberhasilan Pembangunan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 35 orang responden di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dikemukakan sebagai kelayakan responden dalam memberikan informasi mulai dari jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan Jenis kelamin responden terdiri atas laki-laki dan perempuan guna mengetahui proporsi dari Pengaruh Koordinasi Kepala Desasebagai variable bebas (X) terhadap Kinerja Kepala Desa sebagai Kinerja Kepala Desa variable terikat.Dimana jenis kelamin responden berjumlah 35 jiwa, 26 orang jenis laki-laki dengan tingkat persentasi 74.28% dan jenis kelamin perempuan 9 orang dengan tingkat persentasi 25.71%.

Sedangkan ,tingkat Umur/ usia dari responden. Sangat penting untuk mengetahui kemampuan aparat dalam menilai Pengaruh Koordinasi Kepala Desaterhadap Kinerja Kepala Desa, diinterpretasikan bahwa kebanyakan responden penelitian berusia

17-30 tahun yaitu sebanyak 11 orang responden atau 31.42 % dan 31 - 40 tahun sebanyak 9 orang responden atau (25.71 %), dan 41-50 tahun keatas sebanyak 9 orang responden atau (25.71%). Sedangkan yang berumur 50 tahun keatas ada 6 orang responden atau (17.14%). Ini berarti bahwa masyarakat yang mengetahui Koordinasi Kepala Desa sebagai variabel bebas (X) dan Variabel Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) dapat dikatakan usia yang produktif.

Adapun Pendidikan sangat penting untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap dalam Koordinasi Kepala Desa sebagai variabel bebas (X) dan Variabel Tingkat Keberhasilan Pembangunan di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan kebanyakan responden penelitian tingkat pendidikan yaitu SLTA (sekolah Lanjutan Tingkat Atas) sebanyak 5 orang responden atau 55.55% dan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sebanyak 4 orang responden atau (44,44 %), dan SD (Sekolah Dasar) sebanyak 0 orang responden atau (0%). Sedangkan yang berumur Diploma / Sarjana 0 orang responden atau (0 %). Ini berarti bahwa masyarakat yang mengetahui Pengaruh Koordinasi Kepala Desa terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan desa di desa Lalong, masyarakat dapat dikatakan tingkat pendidikannya masih sangat minim.

Penelitian ini menggunakan dua variabel yakni variabel Koordinasi Kepala Desa sebagai variabel bebas (X) dan Variabel Tingkat Keberhasilan Pembangunan Desa sebagai variabel Terikat dengan total indikator dari (X) Koordinasi Kepala Desa dengan indikatornya berjumlah 9 (Sembilan) dan variabel Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) indikator nya berjumlah 6 (enam) Indikator.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan Dari hasil jawaban jawaban responden desa Lalong dan hasil olahan data melalui program SPSS Versi 17 seperti tampak dalam lampiran diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistic

	Mean	Std. Deviation	N
Y	4.1810	.33179	35
X	3.8063	.41952	35

Sumber Data di olah

Berdasarkan dari table 1. didapatkan nilai rata-rata variable terikat Pembangunan Desa Lalong dan variable bebas Koordinasi Kepala Desa . Dari rata-rata Variable bebas Koordinasi Kepala Desa sebesar 2.806 % dengan Standar Devisiasinya sebesar 0.419 sedangkan variable terikat Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) dengan nilai rata-ratanya sebesar 4.18% dengan standart Devisiasi 0.33%

Table 2. Regresi Sederhana

Variabel Terikat	variable Bebas	Koefisien	Probabilitas
Koordinasi Kepala Desa	Konstanta	2.447	0.000
	Tingkat Keberhasilan Pembangunan	0.456	0.000
	R = 0.576 N = 35 K = 2 ^a		
R ² = 0.332 Dk = (n-1)-k			
F Hitung = 16.394		Dk = (35-1)-2= 32	
F tabel = 3.30		T tabel =1.697	
T Hitung X1 = 4.049			

Sumber Olahan Data

$$Y = 2.447 + 0.456 X$$

Dimana :

Y = Tingkat Keberhasilan Pembangunan

X = Koordinasi Kepala Desa

Hasil persamaan regresi sederhana diatas dapat memberikan pengertian :

- 1) Nilai Konstanta b_0 sebesar 0,893 penjelasan diatas dapat diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi oleh variable bebas, yaitu pengaruh variable Koordinasi Kepala Desa (X), maka Koordinasi Kepala Desa tidak akan mengalami perubahan.
- 2) Nilai Koordinasi Kepala Desa sebesar 0.456 artinya Koordinasi Kepala Desa di desa Lalong naik satu kesatuan maka variable Koordinasi Kepala Desa akan naik sebesar 0,456 satuan dengan kata lain bahwa semua variable konstan
- 3) Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.576 nilai ini menunjukkan hubungan keeratan antara variable bebas dengan variable terikat sangat kuat. Kemudian nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.332 angka ini menunjukkan bahwa sumbangan variable bebas yaitu Koordinasi Kepala Desa (X) terhadap peningkatan variable terikat yakni tingkat keberhasilan pembangunan sebesar 33.2 % sementara sisanya 66.8 % dapat dijelaskan pada variable yang lain.
- 4) Pengujian F atau pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi signifikan atau tidak signifikan dan berdasarkan table 5.20 diatas membuktikan bahwa nilai F hitung 16.394 > F table 3.30 dengan tingkat nilai probabilitas 0.000 hal ini membuktikan variable bebas yakni Koordinasi Kepala Desa (X) terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) dapat berpengaruh secara signifikan

Untuk mengetahui apakah masing-masing variable bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

variable terikat dan berdasarkan hasil table 5.20 diatas dimana Koordinasi Kepala Desa (X) menunjukkan t hitung 4.049 sedangkan T table = 1.697 karena T hitung 4.049 > T table 1.697 maka variable Koordinasi Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap Tingkat keberhasilan Pembangunan Di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara

4. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Koordinasi Kepala Desa terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan desa di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara. Dalam penelitian variable bebas yang digunakan adalah Koordinasi Kepala Desa (X) sedangkan variable terikat adalah Tingkat keberhasilan Pembangunan di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara. Berdasarkan perhitungan frekuensinya dan regresi Linier Sederhana dapat diketahui bahwa Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Variabel Bebas Koordinasi Kepala Desa(X) terhadap variable terikat (Y) Tingkat keberhasilan pembangunan dimana nilai variabel bebas menunjukkan t hitung 4.049 sedangkan T table = 1.697 karena T hitung 4.049 > T table 1.697 maka variable Koordinasi Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap Tingkat keberhasilan Pembangunan Di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara

5. SARAN – SARAN

Dari hasil penelitian ini tentang pengaruh Koordinasi Kepala Desa terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan desa di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara yang dapat penulis sarankan adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan hendaknya lebih memacu tingkat partisipasi masyarakat dengan mengadakan pendekatan persuasive sehingga masyarakat merasa terlibat dalam setiap kegiatan Desa

- 2) Diharapkan kepada masyarakat Desa Lalong kecamatan Tinangkung Utara harus dapat meningkatkan koordinasinya dengan pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan pembangunan Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1983. *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan keenam, Penerbit PT Gunung Agung : Jakarta.
- Domai Thahjulin. 1997. *Efektivitas Organisasi*. Lembaga Penerbitan dan Publikasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Etzioni, A. 1985. *Organisasi-organisasi Modern*. UI Press, Jakarta.
- Hall, R. 1974. *Attaining Manufacturing Excellence*. Homewood : Dow Jones-Irwin.
- Haeruman, *Konteks pembangunan pedesaan* , Rajawali press, Jakarta 1997
- Indrawijaya, A.I. 1989. *Perilaku Organisasi*. Sinar Baru, Jakarta.
- Irawan Soehartono. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Lubis, S.B. dan M. Husaini. 1987. *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makra Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial*. Universitas Indonesia, Jakarta
- Mangku Poernomo. 2002. *Sosiologi Pedesaan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Djufri R. Diko, Dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi. (EDISI REVISI)* Fisip Univ. Muhammadiyah Luwuk.
- Siagian, S.P. 1979. *Proses Pembangunan*. Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta.
- 1993 *Administrasi Pembangunan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta

- 1996 *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. PT. Inti Indayu Press, Jakarta
- Soejono Soekamto. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surya Ningrat B. 2001. *Desa dan Kelurahan*. Pusat Kajian Pemerintahan STPDN, Citra Pindo, Bandung.
- Tim penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Jakarta tahun 1988
- Prof.sudrajat Perekonomian Desa, Grafiti, Jakarta 1997
- Widjaja H.A.W. 2001. *Pemerintahan Desa dan Marga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winardin. 1990. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Melton Putra, Jakarta
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/political-economy/2117289-pengertian-perekonomian/#ixzz1hnlKHoiE>
- <http://id.shvoong.com/social-economy/8117275-pengertian-desa/#>